

# PDRB

**Produk Domestik Regional Bruto  
Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran**

**TRIWULAN III  
2022**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH**

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

## PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

### TRIWULAN III TAHUN 2022

Katalog BPS : 9302020.11  
Nomor Publikasi : 11000.2253  
Nomor ISSN : 2502.0889  
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm  
Jumlah Halaman : xvi + 78 Halaman  
Naskah : BPS Provinsi Aceh

#### **Diterbitkan Oleh :**

© BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

## **PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN**

### **TRIWULAN III TAHUN 2022**

#### **Tim Penyusun**

Penanggung Jawab/Pengarah : Ahmadrswan Nasution

Editor : 1. Tasdik Ilhamudin  
2. Maulana MS Aji

Penulis : Afrizah

Pengolah Data & Grafik : Afrizah

Infografis : Afrizah

Lay Out : Afrizah

## KATA PENGANTAR

Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB dilihat dari sisi pengeluaran dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2022 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, Desember 2022  
Kepala BPS Provinsi Aceh



**Ahmadrswan Nasution**

Halaman ini sengaja dikosongkan

## RINGKASAN

Perekonomian Aceh secara *y-on-y* pada triwulan III tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen, dengan nilai PDRB ADHK sebesar 35,14 triliun rupiah meningkat sekitar 0,73 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan III tahun 2021. Nilai PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2022 diperoleh sebesar 53,44 triliun rupiah juga mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan III tahun 2021 yang hanya mencapai 47,58 triliun rupiah, hal ini berarti meningkat sekitar 5,86 triliun rupiah.

Kondisi PDRB triwulan III tahun 2022 secara kumulatif (*c-to-c*) mencapai pertumbuhan sebesar 3,23 persen. Triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai 153,18 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 18,50 triliun rupiah dibandingkan dengan kondisi triwulan I sampai triwulan III tahun 2021 yang hanya mencapai 134,67 triliun rupiah. Secara ADHK, nilai PDRB triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 mencapai 102,81 triliun rupiah mengalami kenaikan sekitar 3,22 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan I sampai triwulan III tahun 2021 yaitu hanya sebesar 99,59 triliun rupiah.

Ekonomi Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022. Ekonomi Aceh juga mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 1,72 persen. Nilai PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 1,65 triliun rupiah, sementara nilai PDRB ADHK pada triwulan III tahun 2022 meningkat sekitar 0,59 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan II tahun 2022.

Komponen PDRB menurut pengeluaran terdiri dari beberapa komponen. Pada triwulan III tahun 2022, nilai PDRB komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) masih menjadi komponen yang paling tinggi nilainya, baik secara ADHB maupun ADHK 2010. Selanjutnya diikuti oleh komponen PMTB yang menduduki peringkat kedua, dan nilai PDRB terbesar ketiga adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P).

Sumber pertumbuhan triwulan III tahun 2022 secara *y-on-y* komponen pengeluaran hampir semuanya memberi sumber positif, kecuali pada komponen PK-P dan PMTB, yaitu masing-masing minus 1,62 persen dan 0,74 persen. Perkembangan ekonomi di wilayah regional Sumatera pada triwulan III tahun 2022 secara tahunan (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,71 persen dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021. Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan total PDRB Sumatera yaitu masing-masing sebesar 23,26 persen, 22,73 persen, dan 13,97 persen. Secara *q-to-q* dan *c-to-c*, ekonomi regional Sumatera juga mengalami pertumbuhan yaitu masing-masing sebesar 2,27 persen dan 4,58 persen.

Nilai *ICOR* Pulau Sumatera menggunakan metode standar pada triwulan III tahun 2017-2022, hampir setiap triwulan III-nya selalu bertanda positif, kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Dengan mengabaikan tanda positif maupun negatif, nilai *ICOR* Pulau Sumatera selama periode triwulan III tahun 2017-2022 paling kecil didapatkan pada triwulan III tahun 2022 yaitu sekitar 2,39. Hal ini menggambarkan bahwa keadaan investasi semakin membaik dibandingkan pada triwulan III tahun sebelumnya. Jika dilihat secara detail, semua provinsi di Sumatera memperoleh nilai koefisien *ICOR* yang lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Nilai *ICOR* Regional Sumatera metode akumulasi diperoleh sebesar 4,77 yang didapatkan dari perbandingan total PMTB dan perubahan total PDRB ADHB provinsi yang ada di wilayah Regional Sumatera. Nilai ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata, Regional Sumatera membutuhkan 4,77 unit PMTB untuk mampu menaikkan PDRB sebesar 1 unit selama periode triwulan III tahun 2017-2022.

Nilai *ILOR* Provinsi Aceh pada triwulan III tahun 2022 yaitu sebesar 0,046, hal ini dapat diartikan bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 46 orang sebagai akibat adanya kenaikan PDRB ADHK sebesar 1 Milyar

rupiah. Besaran penambahan tenaga kerja dan penambahan PDRB jika dihitung setiap satu kurun waktu akan menghasilkan angka yang fluktuatif. Sehingga penghitungan *ILOR* dapat dilakukan dengan membuat rata-rata *ILOR*. Nilai rata-rata *ILOR* pada triwulan III tahun 2017-2022 bernilai positif yaitu 0,06. Hal ini dapat diartikan bahwa, pada triwulan III tahun 2017-2022 rata-rata tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi sebanyak 6 orang sebagai akibat adanya kenaikan output sebesar 100 juta rupiah.

Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) di Provinsi Aceh selama triwulan III periode tahun 2017-2022 mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 16,28 juta rupiah per orang sampai tahun 2022 menjadi 21,25 juta rupiah per orang artinya terjadi peningkatan sebesar 4,97 juta rupiah per orang. Dari sisi kesempatan kerja, pada triwulan III tahun 2021 sampai triwulan III tahun 2022, persentase kesempatan kerja kembali meningkat, seiring dengan semakin pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dari angka yang diperoleh, dapat diketahui bahwa peluang seorang penduduk usia kerja di Provinsi Aceh yang termasuk ke dalam angkatan kerja untuk bisa bekerja pada triwulan III tahun 2022 adalah sekitar 93,83 persen.

Adapun nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh triwulan III tahun 2017 sampai 2022, elastisitas tenaga kerja kondisi triwulan III lebih dominan kepada kategori inelastis, pertumbuhan ekonomi masih mampu meningkatkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja namun persentase pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja. Terdapat 1 (satu) kurun waktu yang masuk ke dalam kategori elastis tetapi bertanda negatif, persentase perubahan nilai PDRB tahun sebelumnya lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi pada triwulan III tahun 2020, penurunan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 tidak menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja, peluang kerja masih terbuka walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Ringkasan.....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Gambar dan Tabel.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
1. Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga.....	4
1.2.2 Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga ...	5
1.2.3 Konsumsi Pemerintah.....	6
1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	7
1.2.5 Perubahan Inventori.....	9
1.2.6 Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	10
1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri.....	10
1.2.8 Net Ekspor Antardaerah.....	10
1.3 Indikator Ekonomi <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> .....	11
1.4 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal ( <i>ILOR</i> ).....	14
1.5 Elastisitas Tenaga Kerja.....	16
Infografis 1.....	19
II. Tinjauan PDRB Provinsi Aceh.....	21
2.1 Nilai PDRB Total dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.....	23
2.2 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran.....	24
Infografis 2.....	27
III. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran.....	29
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> .....	31
3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> .....	34

3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>c-to-c</i> .....	35
3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera .....	36
Infografis 3 .....	39
Infografis 4 .....	41
IV. Analisis ICOR .....	43
Infografis 5 .....	53
V. Analisis Keterkaitan PDRB Dengan Ketenagakerjaan.....	55
5.1 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal/ <i>Incremental Labour Output Ratio (ILOR)</i> .....	57
5.2 Elastisitas Tenaga Kerja .....	59
Lampiran .....	63
Daftar Pustaka .....	75

## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 (Triliun Rupiah) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen).....	23
Gambar 2. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan III Tahun 2022 (Triliun Rupiah).....	25
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>y-on-y</i> dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2022 (persen) .....	31
Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> (Persen).....	33
Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> (Persen) .....	34
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>c-to-c</i> Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan I sampai Triwulan III Tahun 2022 (Persen).....	35
Gambar 7. Pertumbuhan PDRB ( <i>y-on-y</i> ) Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2022 (Persen).....	36
Gambar 8. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2022 <i>y-on-y</i> (Persen).....	37
Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB <i>q-to-q</i> Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2022 (persen) .....	38
Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB <i>c-to-c</i> Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2022 (persen) .....	38
Gambar 11. <i>ICOR</i> dan Laju Pertumbuhan Ekonomi ( <i>y-on-y</i> ) Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022 .....	46
Gambar 12. <i>ICOR</i> dan Laju Pertumbuhan Ekonomi ( <i>y-on-y</i> ) Indonesia Triwulan III Tahun 2017-2022.....	47

Gambar 13.	Perbandingan <i>ICOR</i> Aceh dan Indonesia Triwulan III Tahun 2017-2022 ( <i>y-on-y</i> ).....	48
Gambar 14.	<i>ICOR</i> Provinsi di Wilayah Sumatera Metode Akumulasi Triwulan II Tahun 2017-2022 ( <i>y-on-y</i> ) .....	51
Gambar 15.	Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022 (Juta Rp/Orang) .....	57
Gambar 16.	<i>ILOR</i> Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022 .....	58
Gambar 17.	Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022 (Persen).....	60
Tabel 1.	Perkembangan Nilai <i>ICOR</i> Provinsi di Sumatera Periode Triwulan II Tahun 2017-2022 .....	49
Tabel 2.	Perkembangan Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022.....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022 (Triliun Rupiah).....	51
Lampiran 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022 (Triliun Rupiah).....	52
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan <i>c-to-c</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022 (Persen).....	53
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022 (Persen).....	54
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan <i>q-to-q</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022 (Persen).....	55
Lampiran 6. Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100) Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022.....	56
Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022 (Persen).....	57
Lampiran 8. Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022.....	58
Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan II-2022 (Persen).....	59
Lampiran 10. Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan II-2022.....	60

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

# **PENDAHULUAN**

<https://acehpptps.go.id>



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijakan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan (Sukimo, 2006). Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran.

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai triwulan IV tahun 2014 telah menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000.

Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perubahan tersebut seperti peningkatan penggunaan teknologi dan perkembangan jenis pekerjaan.

## 1.2 Ruang Lingkup

### 1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/ jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain :

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telpon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya.
5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya.

Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *baby sitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dsj), perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRT, karena konsumsi LNPRT sudah menjadi komponen tersendiri. Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah

tangga, digunakan hasil Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT) sebagai data pokok. Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumahtangga triwulanan didasarkan pada data SKKRT, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun dimana data belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

### **1.2.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga**

Pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh : PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi profesi (Orprof) dan serikat buruh,
4. Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi,
5. Partai Politik,
6. Lembaga keagamaan,

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu :

1. Perumahan,
2. Kesehatan,

3. Rekreasi, kebudayaan, dan olahraga,
4. Pendidikan,
5. Perlindungan/jaminan sosial,
6. Keagamaan,
7. Partai politik, organisasi buruh dan organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa lainnya.

Perkiraan besarnya konsumsi LNPRT didasarkan pada data Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga Triwulanan, selain data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.

### 1.2.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Adapun pada sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan output pemerintah, sehingga PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Kegiatan *social transfer in kind purchased market production* juga masuk ke dalam PKP. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 2008, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri. Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB seri baru ini PKP diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

Adapun sumber data yang dipakai untuk memperkirakan besarnya PKP adalah data APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dari kementerian keuangan, APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh,

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari Dinas Keuangan Kabupaten/Kota, dan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dari Desa hasil Survei K3.

#### 1.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nopirin (2000) menjelaskan, investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB. Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004). Menurut Tambunan (2001), di dalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).

Menurut definisi dari BPS, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
  - a. Bangunan tempat tinggal,
  - b. Bangunan bukan tempat tinggal,
  - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, monumen, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air.
  - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari :

- a. Alat-alat transportasi, seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain-lain,
- b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
- c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,
- d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Budidaya sumber daya hayati.

4. Produk kekayaan intelektual meliputi : *research and development*, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan *database*, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.

5. Sistem persenjataan.

6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.

7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.

8. Margin pedagang atau makelar jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas.

9. Barang modal lainnya.

Adapun sumber data dalam memperkirakan nilai PMTB adalah terdiri dari data realisasi investasi dari DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), data impor mesin HS 2 digit, serta dari fenomena dan sumber lainnya.

### 1.2.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, pula pasir, dan gandum.

### **1.2.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri**

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga *free on board* atau f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction* dan *direct purchase non-resident* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa (BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik Ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

### **1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri**

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction*, *direct purchase* penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik Impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

### **1.2.8 Net Ekspor Antardaerah**

Nilai net ekspor antardaerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antardaerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah. Adapun perkiraan nilai net ekspor antardaerah saat ini menggunakan metode *Cross Houling*.

### 1.3 Indikator Ekonomi *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Dalam teori ekonomi, investasi merupakan salah satu faktor produksi yang penting, di samping faktor produksi sumber daya manusia, dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah karena investasi berpotensi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan kapasitas produksi yang meningkat, yaitu misalnya karena investasi digunakan untuk membeli atau menambah barang-barang modal seperti mesin-mesin dan peralatannya, maka hasil-hasil produksi di wilayah tersebut diharapkan juga akan meningkat (Mankiw, 2001).

Ukuran kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi suatu target pendapatan wilayah atau laju pertumbuhan ekonomi tertentu diberikan oleh suatu ukuran atau indikator ekonomi yang disebut sebagai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Dengan *ICOR*, perkiraan kebutuhan investasi dapat diperkirakan untuk mencapai suatu tingkat kinerja ekonomi yang ditetapkan karena *ICOR* merupakan ukuran atau indikator makro yang menghubungkan antara investasi dengan pendapatan wilayah.

Variabel *ICOR* memiliki pola hubungan logaritma-linier dengan variabel pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh negatif signifikan. Artinya apabila *ICOR* naik maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila *ICOR* turun maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan (Siwu, dkk, 2021).

Salah satu komponen PDRB menurut pengeluaran yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB). PMTB menjelaskan besarnya realisasi investasi fisik yang telah dilakukan, investasi fisik terdiri dari investasi yang dilakukan untuk membeli atau menambah atau memperbaiki barang-barang modal seperti bangunan (tempat tinggal dan bukan tempat tinggal), mesin-mesin dan peralatannya, kendaraan, dan melakukan pekerjaan investasi fisik lainnya seperti reklamasi lahan, pemerataan lahan untuk kantor, dan sebagainya.

Nuryadin dan Sodik (2012) dalam jurnal *Penyusunan Indikator Ekonomi Incremental Capital Output Ratio 2011*, secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung *ICOR* adalah:

$$ICOR = \frac{\Delta k}{\Delta Y} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

$\Delta k$  adalah investasi, atau barang modal baru, penambahan kapasitas terpasang

$\Delta Y$  adalah penambahan/pertumbuhan *output*

Dalam praktik, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya investasi yang ditanamkan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan  $\Delta k = I$  ( $I$ = investasi), begitu juga dengan *output* yang diasumsikan sebagai nilai PDRB karena keterbatasan data nilai antara, maka rumus (1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots(2)$$

Rumus (2) ini disebut dengan *Gross ICOR*. Dalam penerapannya rumus *Gross ICOR* ini lebih sering dipakai, karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap. Dalam beberapa hal, untuk kasus-kasus tertentu investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan output pada tahun itu juga, sehingga rumus (2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

$I_t$  adalah investasi pada tahun ke- $t$ ; (dalam hal ini adalah PMTB tahun ke- $t$ )

$Y_t$  adalah *output* pada tahun ke- $t$ ; (PDRB menurut pengeluaran tahun ke- $t$ )

$Y_{t-1}$  adalah *output* pada tahun ke-  $t-1$ ; (PDRB menurut pengeluaran tahun  $t-1$ )

Rumus (3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke  $t$  akan menimbulkan *output* (dalam hal ini PDRB) pada tahun  $t$  itu juga.

Koefisien *ICOR* negatif dapat terjadi jika output pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan output terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi sementara itu barang modal baru tersebut belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi *output* yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan *output* tahun sebelumnya. Sehingga selisih *output* antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien *ICOR*-pun menjadi negatif. Dengan demikian penanaman barang modal baru belum menghasilkan *output* secara optimal, atau bisa

dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi apabila ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi. Koefisien *ICOR* yang relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan *output* yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan *output* pada tahun sebelumnya, atau tambahan *output* yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga tidak efisien dan menghasilkan koefisien *ICOR* yang relatif besar. Widodo dalam (Situmorang, 2011) menyatakan bahwa secara umum, nilai *ICOR* yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik antara 3–4.

Penghitungan *ICOR* dapat dilakukan dengan metode akumulasi yaitu berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan *output* selama periode waktu *t* disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu *t*. Perumusan *ICOR* dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan *output* selama periode waktu *t*1 sampai *t*<sub>n</sub> yang secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots \dots \dots (4)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien *ICOR* ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Akan tetapi metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi tidak bisa mencerminkan *inefficiency* yang memang terjadi dalam praktek.

Walaupun pertambahan *output* sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan *ICOR* ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi *output* selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan. Penghitungan *ICOR* dalam publikasi ini dilihat pada kondisi triwulan 2 periode tahun 2017-2022 menggunakan metode akumulasi yaitu rumus (4), sementara untuk *ICOR* triwulan 3 setiap tahunnya menggunakan metode standar rumus (3).

#### 1.4 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal (*ILOR*)

Pada buku kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang (2017) yang berjudul *Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Kabupaten Lumajang Tahun 2017* dijabarkan bahwa hubungan antara perubahan nilai output dengan penyerapan tenaga kerja dapat dirumuskan dalam indikator *ILOR (Incremental Labour Output Ratio)* dan Produktifitas Tenaga Kerja (PTK). Indikator *ILOR* atau disebut Rasio Tenaga Kerja – Output Marginal digunakan untuk melihat tambahan jumlah orang yang bekerja dengan adanya peningkatan satu satuan nilai PDRB. Sedangkan PTK untuk melihat seberapa besar kinerja dari setiap tenaga kerja dalam menghasilkan output.

*ILOR* adalah perbandingan antara perubahan tenaga kerja ( $\Delta L$ ) terhadap perubahan output ( $\Delta Y$ ) perekonomian suatu wilayah. Perubahan tenaga kerja merupakan selisih antara jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor ekonomi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Sedangkan perubahan output didekati dengan selisih nilai tambah bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, selain menggambarkan tingkat efisiensi faktor tenaga kerja, juga dapat diketahui seberapa besar tenaga kerja yang dapat terserap per tahun jika terjadi penambahan output per satuan PDRB di suatu wilayah. *ILOR* dapat dinyatakan sebagai :

$$ILOR = \frac{\Delta L}{\Delta Y} \dots\dots\dots(5)$$

dimana :

$\Delta L$ ) = penambahan/penyerapan tenaga kerja

$(\Delta Y)$  = penambahan output (didekati dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan)

Dengan menggunakan rumus (5) dapat diperoleh nilai *ILOR* untuk masing-masing komponen per tahun. Untuk mendapatkan angka *ILOR* dalam periode tertentu digunakan metode rata-rata sederhana. Rumus *ILOR* yang digunakan untuk periode t hingga periode t+i adalah sebagai berikut :

$$ILOR = \frac{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta L}{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta Y} \dots\dots\dots(6)$$

Disamping itu dapat diketahui juga mengenai produktifitas tenaga kerja menggunakan indikator Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) yang dinyatakan sebagai berikut

$$PTK = \frac{Y}{L} \dots\dots\dots(7)$$

dimana :

Y = Output (didekati dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku)

L = Labour (Jumlah tenaga kerja)

Meskipun secara teori *ILOR* dapat dihitung secara tahunan, namun besaran  $\Delta L$  maupun  $\Delta Y$  jika dihitung setiap tahun bisa menjadi bias ketika ada fluktuasi tahunan dalam penyerapan tenaga kerja maupun kinerja ekonomi pada tahun tertentu ketika ada instabilitas. Oleh sebab itu, *ILOR* dihitung rata-rata per tahun dalam kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahunan.

Besaran *ILOR* dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dikaitkan dengan peluang penyerapan tenaga kerja, *ILOR* bermakna positif dalam arti setiap tambahan satu satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga semakin besar *ILOR* semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Tentunya, untuk melihat besarnya angkatan kerja yang tidak terserap masih harus melihat nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kedua, jika dikaitkan dengan produktifitas maka semakin besar nilai *ILOR* berarti tenaga kerja semakin tidak produktif karena nilai PTK semakin kecil. Sehingga kondisi ideal yang ingin dicapai tentu nilai *ILOR* rendah dan pada saat yang sama nilai TPT juga rendah. Artinya sedikit pengangguran sedangkan para pekerja masih mampu menghasilkan barang/jasa secara optimal sehingga tingkat kejahteraan diharapkan tercapai atau telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Jika besaran *ILOR* bernilai negatif berarti dalam kurun waktu tertentu ada ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output perekonomian. Ada kalanya telah terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja tetapi masih mampu menghasilkan nilai output yang cukup tinggi. Atau banyak tenaga kerja yang terserap tetapi justru terjadi penurunan nilai tambah bruto. Kedua hal tersebut akan sama-sama berdampak kurang baik pada dimensi sosial maupun ekonomi. Untuk daerah-daerah yang masih berkembang tentunya akan mengutamakan terserapnya tenaga kerja dalam jumlah besar terlebih dahulu pada tingkat produktifitas yang masih relatif baik.

Badan Pusat Statistik selaku penyedia data ketenagakerjaan melakukan survei Sakernas setiap dua tahun sekali yaitu untuk menggambarkan ketenagakerjaan pada Bulan Februari dan pada Bulan Agustus. Sampel yang digunakan pada Bulan Februari lebih sedikit, dan dipakai hanya untuk menggambarkan ketenagakerjaan wilayah provinsi saja, sedangkan pada bulan Agustus sampel yang dipakai lebih banyak dan bisa dipakai untuk menggambarkan ketenagakerjaan sampai kabupaten/kota. Penghitungan *ILOR* triwulan III dihitung menggunakan data sakernas agustus dan PDRB triwulan III. Estimasi olahan data sakernas sejak february 2020 sudah menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015.

### 1.5 Elastisitas Tenaga Kerja

Anton Trianto (2017) menjabarkan bahwa secara teoritis terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan kausalitas. Sementara keterkaitan erat juga ada pada tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka berarti terjadi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah sehingga secara teori peningkatan ini menandakan adanya ekspansi dalam kegiatan produksi yang kemudian meningkatkan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Tingkat Kesempatan Kerja adalah indikator yang menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Dengan kata lain indikator ini menghitung peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat Kesempatan Kerja dihitung dengan mencari persentase dari perbandingan antara jumlah penduduk bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rumus Tingkat Kesempatan Kerja adalah sebagai berikut :

$$TKK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

Secara teoritis, ada tiga cara pokok untuk menciptakan kesempatan kerja atau berusaha dalam jangka panjang. Cara pertama adalah dengan memperlambat laju

pertumbuhan penduduk yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi penawaran tenaga kerja. Tetapi cara ini tidak memadai lagi bagi Indonesia karena angka kelahiran memang telah relatif rendah dan dampaknya terhadap pertumbuhan tenaga kerja kurang signifikan dalam jangka pendek. Cara kedua adalah dengan meningkatkan intensitas pekerja dalam menghasilkan output (*labour intensity of output*). Tetapi dalam jangka panjang, cara ini tidak selalu berhasil karena tidak selalu kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Cara ketiga adalah melalui pertumbuhan ekonomi. Cara ini bukan tanpa kualifikasi karena secara empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja tidak terdapat hubungan otomatis atau niscaya, tetapi justru tantangannya menjadi riil, karena hubungan yang tidak otomatis itu, maka peranan pemerintah menjadi strategis dan *crucial* untuk merancang strategi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga "ramah" terhadap ketenagakerjaan (Mahalli, 2008: 128).

Menurut Case dan Fair (2007: 109) dalam ilmu ekonomi, dengan logika sederhana kita dapat mengetahui bagaimana perubahan dalam suatu variabel, seperti harga barang atau tingkat bunga cenderung mempengaruhi perilaku. Begitu juga dalam penyerapan tenaga kerja. Jika PDRB suatu sektor meningkat maka permintaan terhadap tenaga kerja di sektor tersebut juga akan meningkat begitu juga sebaliknya jika PDRB mengalami penurunan maka akan terjadi pengurangan tenaga kerja di setiap sektor ekonomi tersebut. Hal ini akan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah pengangguran. Koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: yaitu persentase pertumbuhan tenaga kerja pertahun dibanding dengan persentase pertumbuhan PDRB pertahun. Rumus koefisien elastisitas penyerapan tenaga kerja adalah sebagai berikut:

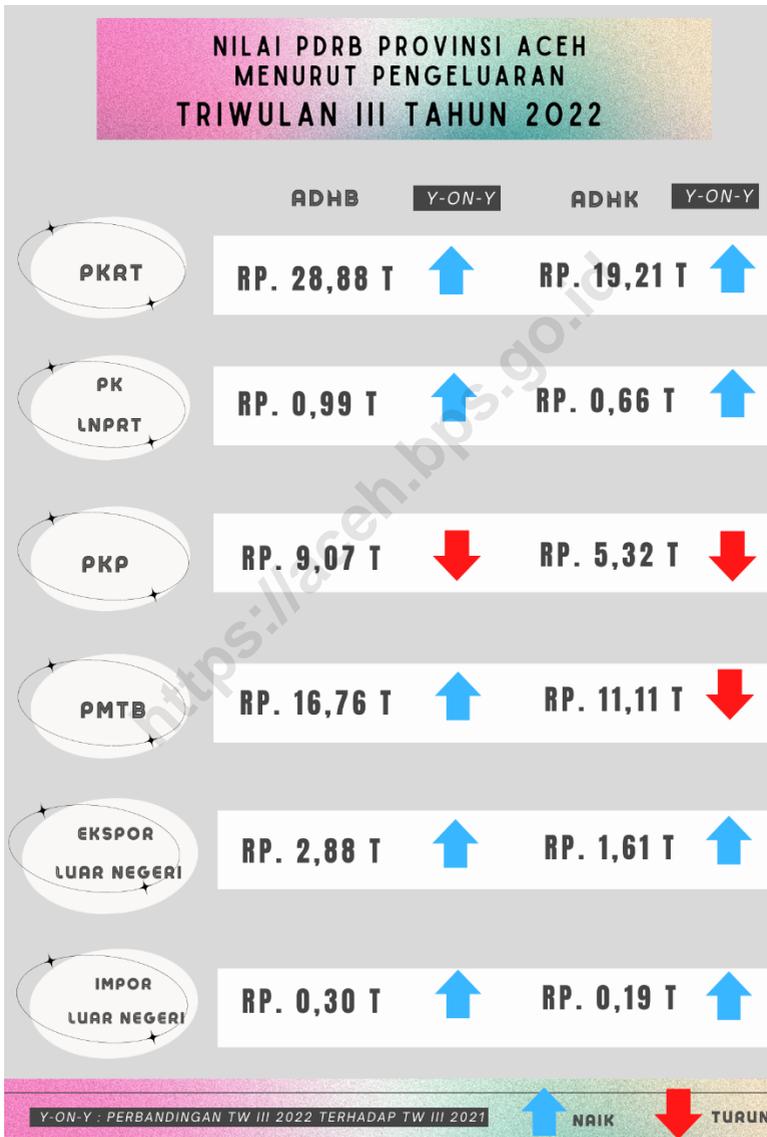
$$\text{Elastisitas } PTK = \frac{\% \text{ pertumbuhan jumlah tenaga kerja}}{\% \text{ pertumbuhan ekonomi (PDRB)}} \dots\dots\dots(9)$$

Secara umum elastisitas adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai dimana besar pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain dalam kurun waktu tertentu dengan nilai koefisien elastisitas berkisar antara nol dan tak terhingga.

Perlu di ingat dalam perhitungan nilai elastisitas tanda minus (-) atau plus (+) sering di abaikan karena nilai yang negatif dikarenakan perubahan variabel yang satu ke variabel yang lain adalah menggambarkan perubahan ke arah yang berbalikan. Dengan mengadopsi konsep elastisitas, analisis perubahan penyerapan tenaga kerja akibat perubahan pertumbuhan ekonomi akan digolongkan menjadi lima jenis tipe elastisitas yaitu elastis sempurna, inelastis sempurna, elastis, inelastis, dan uniter. Pada kasus elastisitas penyerapan tenaga kerja, penjelasan kategori elastisitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Inelastis sempurna adalah perubahan PDRB tidak mengubah jumlah pertumbuhan jumlah tenaga kerja walaupun pertumbuhan PDRB mengalami kenaikan atau penurunan. Nilai koefisien elastisitasnya adalah 0 (nol).
2. Elastis sempurna adalah apabila pertumbuhan jumlah tenaga kerja akan tetap terjadi walaupun tidak terjadi pertumbuhan PDRB. Nilai koefisien elastisitasnya adalah tidak terhingga ( $\infty$ ).
3. Elastisitas uniter adalah elastisitas yang mempunyai koefisien elastisitas permintaan sebesar 1 (satu). Elastisitas ini menggambarkan keadaan apabila persentase pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan persentase pertumbuhan jumlah tenaga kerja.
4. Tidak elastis (inelastis) adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih besar dari pada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai koefisien elastisitasnya kurang dari 1 (satu).
5. Elastis adalah keadaan di mana persentase perubahan PDRB lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Nilai koefisien elastisitasnya lebih dari 1 (satu).

Infografis 1.



<https://aceh.bps.go.id>



***TJNJAWAN PDRB  
PROVINSI ACEH***

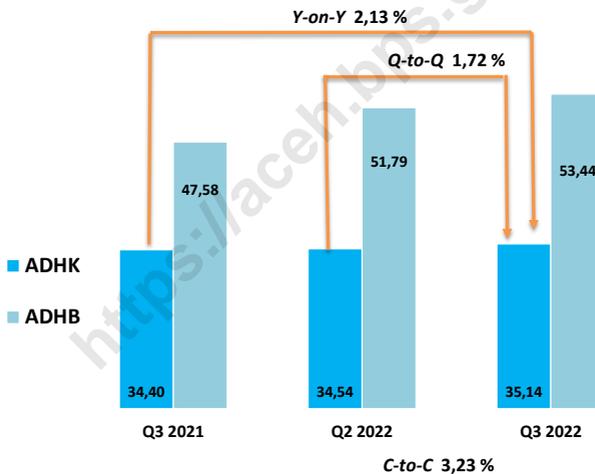
<https://aceh.bps.go.id>



## II. TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

### 2.1 Nilai PDRB Total dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Pada Gambar 1 dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) pada umumnya selalu lebih tinggi daripada nilai PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). Perbedaan antara nilai PDRB ADHB dengan ADHK ini disebabkan karena penghitungan PDRB ADHB dipengaruhi oleh perubahan harga pada setiap tahunnya, sedangkan penghitungan PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh perubahan harga karena hanya melihat pengaruh harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010.



**Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 (Triliun Rupiah) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen)**

Tinjauan PDRB secara tahunan (*y-on-y*) triwulan III tahun 2022 menggambarkan perkembangan PDRB ADHK 2010 pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021. Perekonomian Aceh secara *y-on-y* pada triwulan III tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen, dengan nilai PDRB ADHK sebesar 35,14 triliun rupiah meningkat sekitar 0,73 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan III tahun

2021. Nilai PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2022 diperoleh sebesar 53,44 triliun rupiah juga mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan III tahun 2021 yang hanya mencapai 47,58 triliun rupiah, hal ini berarti meningkat sekitar 5,86 triliun rupiah.

Kondisi PDRB triwulan III tahun 2022 secara kumulatif (*c-to-c*) mencapai pertumbuhan sebesar 3,23 persen. Triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2022 nilai PDRB ADHB mencapai 153,18 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 18,50 triliun rupiah dibandingkan dengan kondisi triwulan I sampai triwulan III tahun 2021 yang hanya mencapai 134,67 triliun rupiah. Secara ADHK, nilai PDRB triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 mencapai 102,81 triliun rupiah mengalami kenaikan sekitar 3,22 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan I sampai triwulan III tahun 2021 yaitu hanya sebesar 99,59 triliun rupiah.

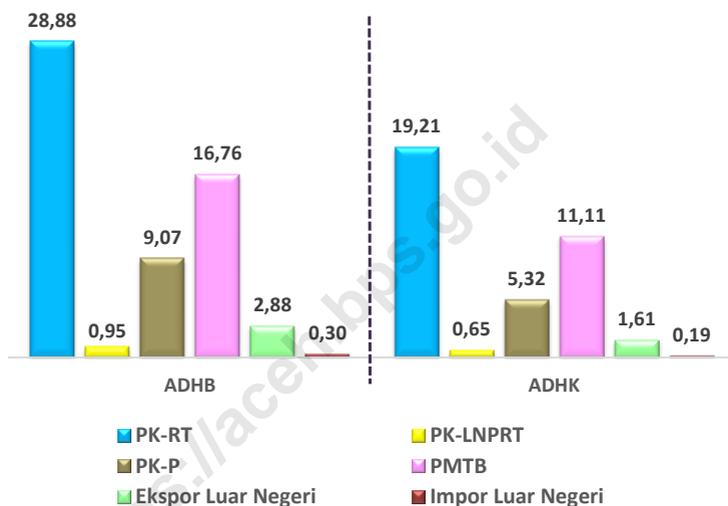
Adapun ekonomi Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2022. Ekonomi Aceh juga mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 1,72 persen. Nilai PDRB ADHB pada triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan sekitar 1,65 triliun rupiah, sementara nilai PDRB ADHK pada triwulan III tahun 2022 meningkat sekitar 0,59 triliun rupiah dibandingkan pada triwulan II tahun 2022.

## 2.2 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran

Komponen PDRB menurut pengeluaran terdiri dari beberapa komponen. Pada triwulan III tahun 2022, nilai PDRB komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT) masih menjadi komponen yang paling tinggi, baik secara ADHB maupun ADHK 2010. Selanjutnya di ikuti oleh komponen PMTB yang menduduki peringkat kedua, dan nilai PDRB terbesar ketiga adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P).

Secara detail dapat dijelaskan bahwa nilai PDRB ADHB dari PK-RT adalah sebesar 28,88 triliun rupiah dan secara ADHK diperoleh nilai PDRB sebesar 19,21 triliun rupiah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang menduduki peringkat kedua dengan nilai PDRB ADHB mencapai 16,76 triliun rupiah, dan secara ADHK diperoleh sebesar 11,11 triliun rupiah. Komponen PKP mempunyai nilai PDRB ADHB dan

ADHK terbesar ketiga, yaitu masing-masing dengan nilai sebesar 9,07 triliun rupiah dan 5,32 triliun rupiah.



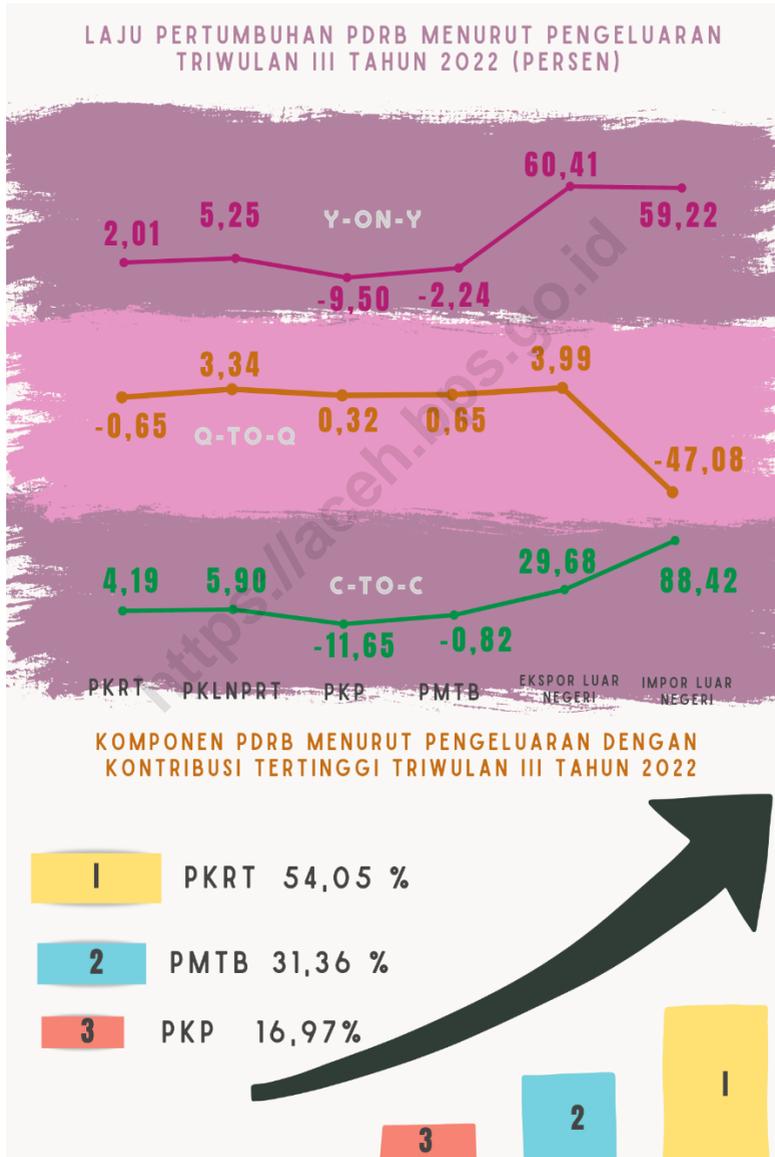
**Gambar 2. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan III Tahun 2022 (Triliun Rupiah)**

Adapun komponen lain, diantaranya adalah komponen ekspor luar negeri diperoleh nilai PDRB ADHB sebesar 2,88 triliun rupiah dan secara ADHK sebesar 1,61 triliun rupiah. Diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (PK-LNPRT) dengan nilai PDRB ADHB sebesar 0,95 triliun rupiah dan secara ADHK sebesar 0,65 triliun rupiah. Komponen impor luar negeri dengan nilai PDRB ADHB sebesar 0,30 triliun rupiah, dan secara ADHK sebesar 0,19 triliun rupiah.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://acehbps.go.id>

Infografis 2.



<https://aceh.bps.go.id>

***PDRB PROVINSI ACEH  
MENURUT PENGELUARAN***

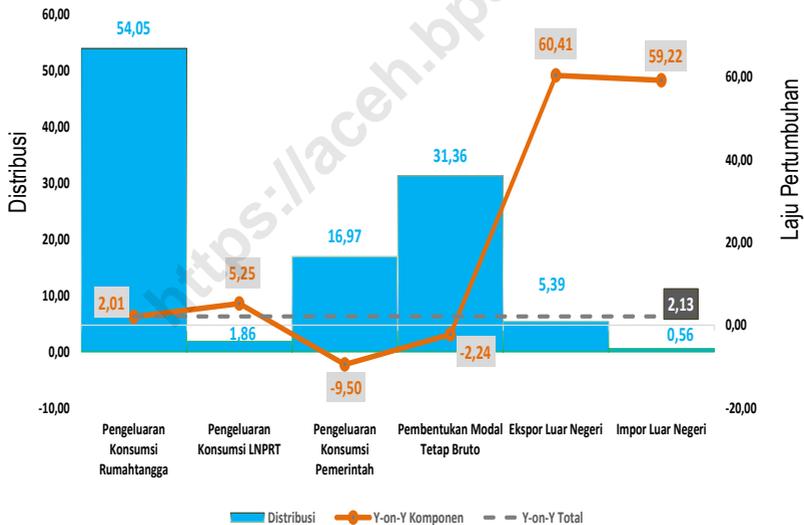
<https://acehbps.go.id>



### III. PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

#### 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y*

Perekonomian Aceh secara *y-on-y* mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 2,13 persen. Berdasarkan PDRB pengeluaran, pertumbuhan terjadi hampir pada semua komponen pengeluaran, kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) dan komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 9,50 persen dan 2,24 persen. Secara distribusi, komponen PK-P dan PMTB mempunyai peran terbesar terhadap PDRB yaitu masing-masing sebesar 16,97 persen dan 31,36 persen.



**Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi *y-on-y* dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2022 (Persen)**

Berdasarkan struktur PDRB menurut pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang memberikan peran terbesar. Pada triwulan III tahun 2022, peranan komponen ini sekitar 54,05 persen. Secara *y-on-y*,

pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga mencapai 2,01 persen. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan dengan kondisi pada triwulan sebelumnya yang mencapai 4,27 persen secara *y-on-y*. Pertumbuhan pada komponen ini utamanya didorong oleh pengeluaran masyarakat pada sub komponen pendidikan yaitu mengawali kegiatan tahun ajaran baru dengan membayar berbagai jenis biaya pendidikan anak sekolah maupun mahasiswa. Selain itu, sebelum memasuki masa sekolah, waktu luang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan rekreasi dan hiburan sehingga penginapan dan hotel juga ikut mengalami peningkatan. Sehubungan dengan kondisi pandemi yang sudah semakin membaik, masyarakat sudah lebih leluasa dalam melakukan berbagai kegiatan dibandingkan dengan triwulan III pada tahun 2021.

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan peranan kedua terbesar setelah komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 31,68 persen. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, komponen PMTB secara *y-on-y* mengalami penurunan sebesar 2,24 persen. Berdasarkan subkomponennya, hanya PMTB non-bangunan yang mengalami penurunan, utamanya disebabkan karena sudah selesai/berhenti sementara pengadaan impor mesin pembangkit listrik. Sementara itu, subkomponen PMTB bangunan mengalami pertumbuhan, utamanya disebabkan oleh realisasi belanja modal APBN dan APBD yang sedikit lebih meningkat.

Komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT mengalami pertumbuhan sebesar 5,25 persen dan merupakan pertumbuhan ketiga tertinggi pada triwulan III tahun 2022. Salah satu sebab utama kenaikan adalah meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga non-profit yang melayani rumah tangga dalam rangka kegiatan pemotongan hewan qurban pada perayaan hari raya idul adha 1443 H. Jika dilihat secara distribusi, komponen PK-LNPRRT memberikan peranan sebesar 1,86 persen.

Komponen impor luar negeri sebagai komponen pengurang terhadap total PDRB mengalami peningkatan pertumbuhan yang signifikan, yaitu mencapai 59,22 persen. Subkomponen impor barang dan jasa sama-sama mengalami pertumbuhan, adapun komoditas impor yang paling dominan pada triwulan III 2022 adalah pada komoditas bahan kimia organik, sedangkan untuk impor jasa masih sangat dipengaruhi oleh

peningkatan kegiatan perusahaan travel yang memberangkatkan jamaah umroh. Dari sisi distribusi, komponen impor luar negeri mempunyai peran yang kecil yaitu berkisar 0,56 persen.

Komponen ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu mencapai 60,41 persen. Pertumbuhan ekspor luar negeri disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan subkomponen ekspor barang yang meningkat signifikan, terutama pada komoditas bahan bakar mineral khususnya batubara serta komoditas kopi. Disisi lain, subkomponen ekspor jasa juga mengalami peningkatan utamanya dipengaruhi oleh sudah tercatat adanya kunjungan wisatawan asing ke Provinsi Aceh. Jika dilihat secara distribusi, komponen ekspor luar negeri memberikan peranan sekitar 5,39 persen terhadap total PDRB.

Berdasarkan sumbernya, pada triwulan III tahun 2022 sumber pertumbuhan komponen pengeluaran hampir semuanya memberi sumber positif, kecuali pada komponen PK-P dan PMTB, yaitu masing-masing minus 1,62 persen dan 0,74 persen (Gambar 4).

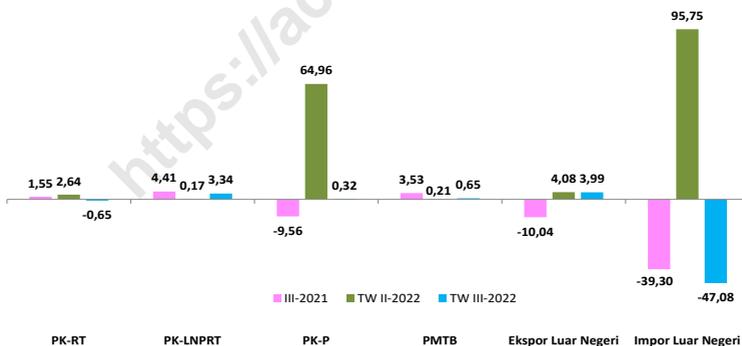


**Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y* (Persen)**

Komponen ekspor luar negeri memberikan sumber pertumbuhan positif terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi secara total, yaitu mencapai 1,76 persen, selanjutnya diikuti oleh komponen PKRT yaitu sebesar 1,10 persen. Sementara komponen impor sebagai komponen pengurang terhadap total PDRB memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,20 persen. Komponen LNPRT memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,10 persen terhadap pertumbuhan PDRB secara total.

### 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *q-to-q*

Perekonomian Aceh pada triwulan III tahun 2022 mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 1,72 persen dibandingkan triwulan II-2022. Jika dilihat secara detail, pertumbuhan terjadi pada semua komponen, kecuali pada komponen PKRT dan Komponen impor luar negeri masing-masing mengalami penurunan yaitu sekitar 0,65 persen dan 47,08 persen.



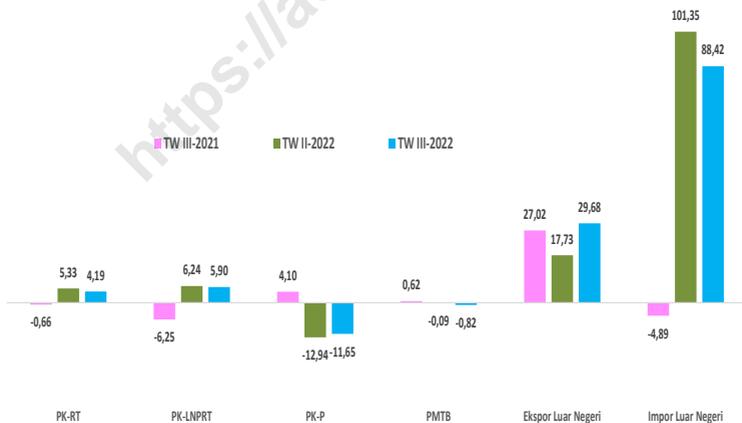
**Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Komponen Pengeluaran Provinsi Aceh *q-to-q* (Persen)**

Komponen ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sekitar 3,99 persen, diikuti pertumbuhan komponen lainnya; PK-LNPRT sekitar 3,34 persen; komponen PMTB sekitar 0,65 persen; komponen PKP sekitar 0,32 persen.

### 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *c-to-c*

Kondisi perekonomian Aceh kumulatif dari triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 dibandingkan kumulatif dari triwulan I sampai triwulan III tahun 2021 (*c-to-c*) mengalami pertumbuhan sekitar 3,23 persen. Gambaran pertumbuhan ekonomi secara *c-to-c* dapat dilihat pada Gambar 7. Hampir semua komponen mengalami pertumbuhan, kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB yaitu masing-masing turun sebesar 11,65 persen dan 0,82 persen.

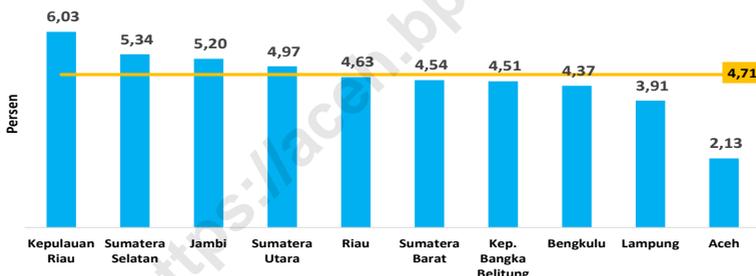
Komponen impor luar negeri mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu mencapai 88,42 persen, namun demikian komponen ini merupakan faktor pengurang terhadap total PDRB secara pengeluaran. Pertumbuhan berikutnya diikuti oleh komponen ekspor luar negeri yaitu mencapai 29,68 persen. Komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT secara kumulatif juga mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 5,90 persen, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,19 persen.



Gambar 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi *c-to-c* Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan I sampai Triwulan III Tahun 2022 (Persen)

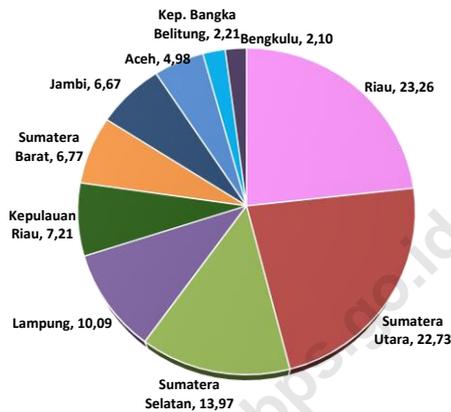
### 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

Pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Sumatera pada triwulan III tahun 2022 secara tahunan (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,71 persen dibanding dengan triwulan III tahun 2021. Jika dilihat secara mendetail, semua provinsi di wilayah Sumatera mengalami pertumbuhan positif (Gambar 7). Terdapat 4 (empat) provinsi yang pertumbuhannya di atas pertumbuhan Pulau Sumatera; Kepulauan Riau 6,03 persen, Sumatera Selatan 5,34 persen; Jambi 5,20 persen, dan Sumatera Utara 4,97 persen. Provinsi lainnya mengalami pertumbuhan di bawah pertumbuhan Pulau Sumatera. Gambaran pertumbuhan ekonomi regional Sumatera dapat dilihat pada Gambar 7 di bawah ini:



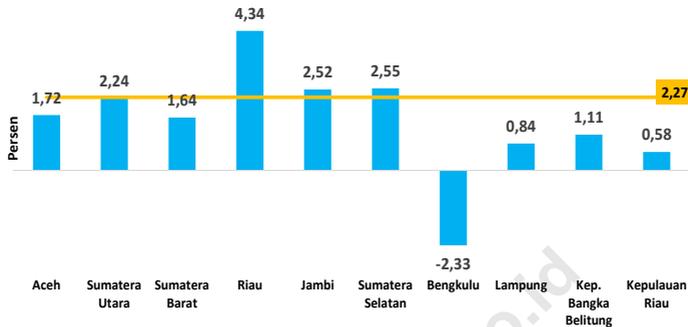
**Gambar 7. Pertumbuhan PDRB (*y-on-y*) Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2022 (Persen)**

Selanjutnya, gambaran kontribusi PDRB provinsi-provinsi di wilayah Regional Sumatera dapat disajikan pada Gambar 8. Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 23,26 persen, 22,73 persen, dan 13,97 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari PDRB Regional Sumatera triwulan III tahun 2022 berasal dari tiga provinsi tersebut. Kontribusi terkecil terhadap PDRB Regional Sumatera adalah Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung yaitu berkontribusi masing-masing 2,10 persen dan 2,21 persen. Sementara itu, Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,98 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan III tahun 2022 *y-on-y* (Gambar 8).



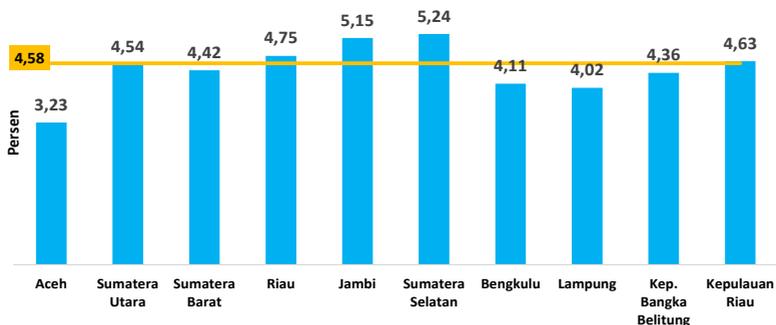
**Gambar 8. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera Triwulan III tahun 2022 y-on-y (Persen)**

Secara *q-to-q*, ekonomi regional Sumatera juga mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 2,27 persen. Jika dilihat provinsi yang berada pada regional Sumatera, hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan tetapi dengan angka yang bervariasi yaitu mulai dari paling rendah sekitar 0,58 persen sampai dengan paling tinggi mencapai 4,34 persen (Gambar 9). Sementara itu, Provinsi Bengkulu mengalami penurunan ekonomi yaitu sekitar 2,33 persen. Terdapat 4 (empat) provinsi yang mengalami pertumbuhan di atas Pulau Sumatera yaitu; Riau 4,34 persen; Sumatera Selatan 2,55 persen dan Jambi 2,52 persen. Sedangkan provinsi lainnya berada di bawah pertumbuhan Pulau Sumatera.



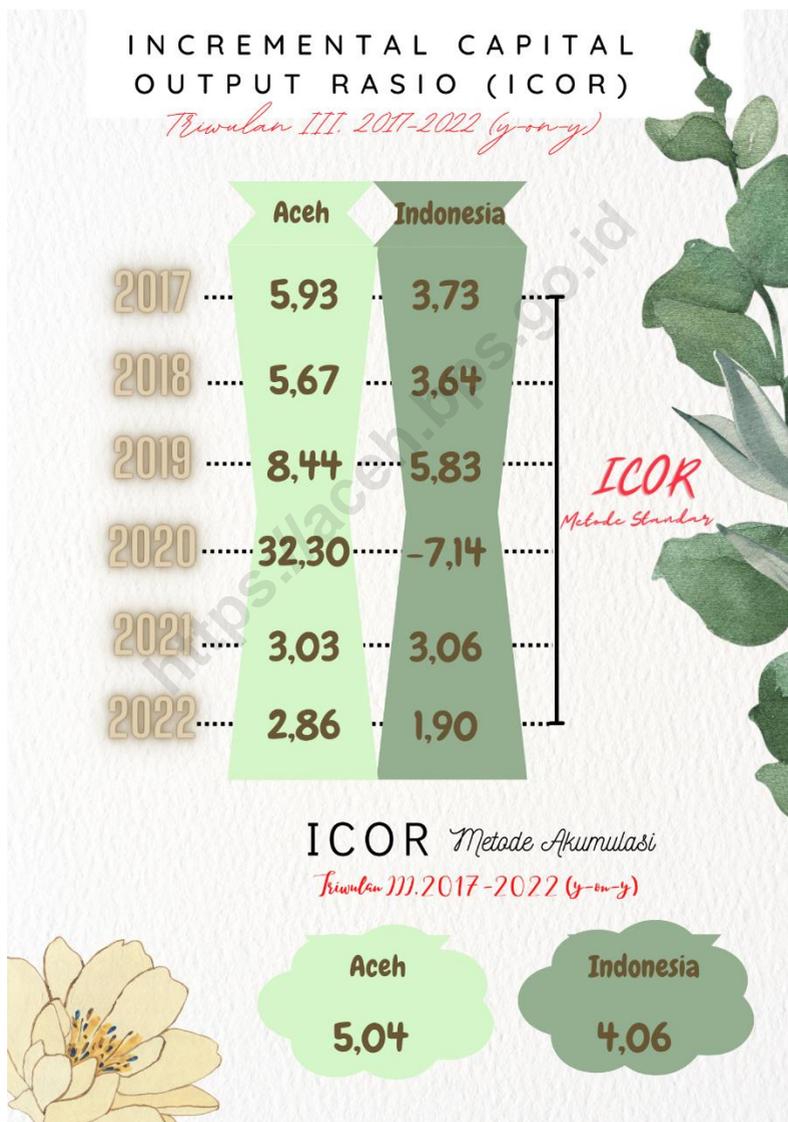
**Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB q-to-q Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2022 (Persen)**

Adapun perkembangan ekonomi secara c-to-c, yaitu kondisi kumulatif triwulan I sampai triwulan III tahun 2022 dibandingkan dengan kumulatif triwulan I sampai triwulan III tahun 2021, Pulau Sumatera juga mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 4,58 persen. Semua provinsi di Pulau Sumatera juga mengalami pertumbuhan, terdapat 3 (tiga) provinsi yang mengalami pertumbuhan di atas Pulau Sumatera; Provinsi Sumatera Selatan 5,24 persen; Jambi 5,15 persen dan Riau 4,75 persen. Sementara provinsi lainnya berada di bawah pertumbuhan Pulau Sumatera.



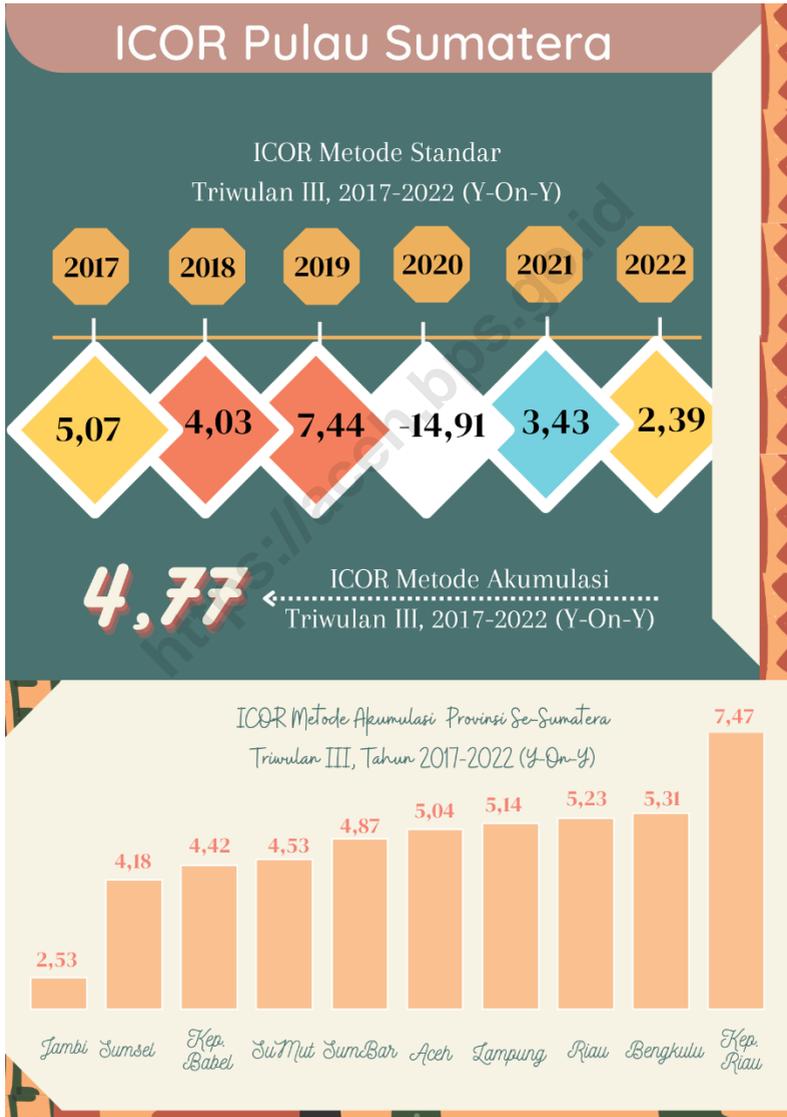
**Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB c-to-c Regional Sumatera Triwulan III Tahun 2022 (Persen)**

Infografis 3.



<https://aceh.bps.go.id>

Infografis 4.



<https://aceh.bps.go.id>

# ***ANALISIS JCOR***

<https://acehjobs.go.id>



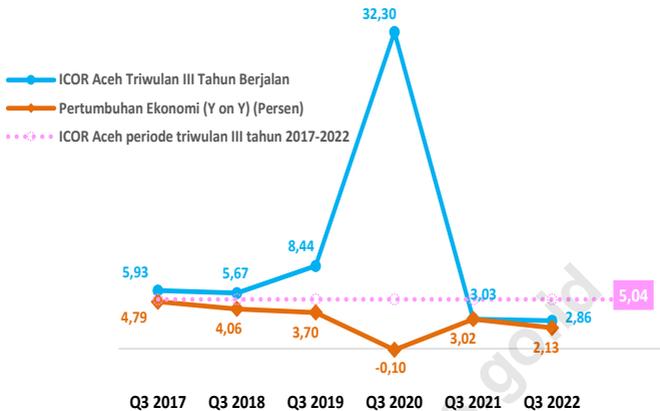
#### IV. ANALISIS ICOR

Koefisien *ICOR* adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output (dalam hal ini PDRB). Tinggi rendahnya *ICOR* juga mencerminkan tinggi rendahnya biaya ekonomi atas investasi agregatif. Tambahan kapital (investasi) baru ini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Besaran *ICOR* diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan PDRB. Nilai PMTB dan tambahan PDRB diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Aceh. Semakin tinggi nilai *ICOR*, semakin banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan PDRB. Besaran koefisien *ICOR* mencerminkan produktivitas PMTB yang pada akhirnya berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai, semakin kecil koefisien *ICOR* menunjukkan semakin efisien pembentukan modal yang terjadi.

Pada Gambar 11, menunjukkan bahwa koefisien *ICOR* dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pola hubungan logaritma-linier dan berpengaruh negatif signifikan. Apabila koefisien *ICOR* besar maka pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari koefisien *ICOR* itu sendiri, begitu juga sebaliknya, jika koefisien *ICOR* lebih kecil maka pertumbuhan ekonomi cenderung lebih besar.

Koefisien *ICOR* pada periode triwulan III tahun 2017-2022 selalu bernilai positif walaupun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan. Seperti diketahui bahwa pada triwulan III tahun 2020, pandemi covid-19 masih sangat berdampak buruk pada perekonomian, sehingga penanaman modal baru tidak mampu menghasilkan PDRB secara optimal. Berikutnya, pada triwulan III tahun 2021, seiring dengan melandainya pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi semakin membaik yaitu mencapai 3,02 persen, dengan koefisien *ICOR* sebesar 3,03. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan sekitar 3,03 unit PMTB untuk menaikkan 1 unit PDRB. Nilai *ICOR* ini dikatakan mampu memberikan produktivitas investasi yang baik.



**Gambar 11. ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022**

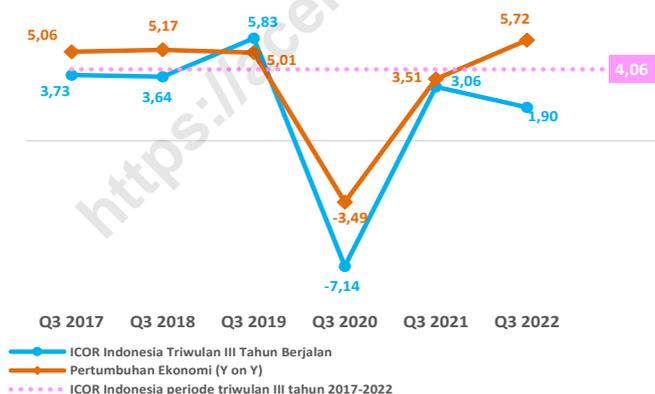
Pada triwulan III tahun 2022, aktivitas masyarakat sudah mulai normal kembali, pemerintah pun sudah mencabut peraturan pembatasan sosial, sehingga perekonomian juga semakin membaik. Namun jika dibandingkan secara *y-on-y*, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2022 melambat, yaitu dengan pertumbuhan hanya sebesar 2,13 persen dengan nilai koefisien ICOR sebesar 2,86. Hal ini berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit dibutuhkan PMTB sebesar 2,86 unit.

Nilai *ICOR* secara triwulanan pada tahun berjalan menunjukkan angka yang fluktuatif. Oleh sebab itu, dilihat juga perkembangan nilai *ICOR* secara periodik. Berdasarkan gambar 11, dapat diketahui bahwa nilai *ICOR* Provinsi Aceh triwulan III periode tahun 2017-2022 adalah sebesar 5,04. Ini berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit pada periode triwulan II tahun 2017-2022 dibutuhkan PMTB sebesar 5,04 unit.

Pada Gambar 12, hubungan koefisien *ICOR* Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi juga memiliki pola hubungan logaritma-linier dan berpengaruh negatif signifikan. Apabila koefisien *ICOR* besar maka pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari koefisien *ICOR*

itu sendiri, begitu juga sebaliknya, jika koefisien ICOR lebih kecil maka pertumbuhan ekonomi cenderung lebih besar.

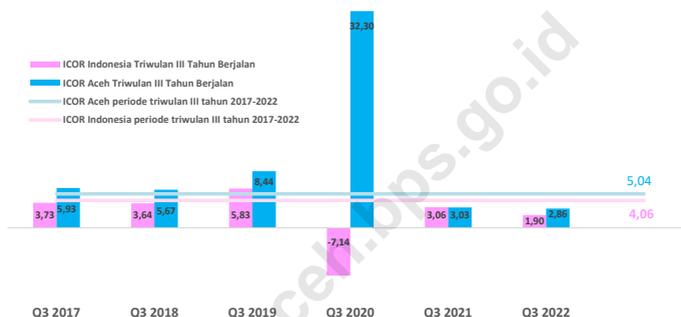
Koefisien *ICOR* Indonesia selama periode triwulan III tahun 2017-2022 juga hampir selalu bernilai positif, kecuali pada triwulan III tahun 2020, seiring dengan perekonomian Indonesia yang juga mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode triwulan III tahun 2017-2022 paling tinggi diperoleh pada tahun 2022, yaitu sekitar 5,72 persen dengan ICOR sekitar 1,90. Ini berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit dibutuhkan PMTB sebesar 1,90 unit. Angka ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan kondisi ekonomi yang semakin membaik setelah kondisi pandemi covid-19 yang mulai terjadi pada awal tahun 2020, dan didukung juga oleh nilai ICOR yang lebih kecil, walaupun belum dapat dikatakan terjadinya produktivitas investasi secara efektif dan efisien.



**Gambar 12. ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Indonesia Triwulan III Tahun 2017-2022**

Jika dilihat secara periodik, koefisien ICOR Indonesia selama periode triwulan III tahun 2017-2022 sebesar 4,06. Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit selama periode tersebut, dibutuhkan PMTB sebesar 4,06 unit.

Selama periode triwulan III tahun 2017-2022, jika disandingkan nilai *ICOR* Provinsi Aceh dengan nilai *ICOR* Indonesia, maka didapatkan bahwa *ICOR* Aceh baik secara periodik maupun triwulanan, secara umum menunjukkan bahwa nilainya lebih besar dibandingkan dengan nilai *ICOR* Indonesia. Hal ini berarti bahwa efisiensi penanaman modal di Provinsi Aceh masih belum optimal dibandingkan dengan efisiensi rata-rata penanaman modal provinsi-provinsi di Indonesia (Gambar 13).



**Gambar 13. Perbandingan *ICOR* Aceh dan Indonesia Triwulan III Tahun 2017-2022 (y-on-y)**

Selanjutnya, pada tabel 1 dapat dilihat perkembangan *ICOR* di wilayah Regional Sumatera periode triwulan III tahun 2017-2022. Diketahui bahwa pada tahun 2020, *ICOR* Sumatera bertanda negatif yaitu sekitar 14,91. Ini disebabkan karena perekonomian Pulau Sumatera pada triwulan III tahun 2020 mengalami penurunan karena dampak pandemi covid-19. Pada triwulan III tahun 2021, koefisien *ICOR* diperoleh sebesar 3,43, dapat diartikan bahwa dibutuhkan 3,43 unit PMTB untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit. Sedangkan pada triwulan III tahun 2022, koefisien *ICOR* semakin kecil yaitu sebesar 2,39, dapat diartikan bahwa dibutuhkan 2,39 unit PMTB untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit.

Tabel 1. Perkembangan Nilai ICOR Provinsi di Sumatera Periode Triwulan III Tahun 2017-2022 Metode Standar

Provinsi	Triwulan III					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,93	5,67	8,44	32,30	3,03	2,86
Sumatera Utara	3,80	4,28	4,23	(296,26)	4,54	2,78
Sumatera Barat	3,75	4,11	4,37	(8,07)	7,03	2,22
Riau	15,29	3,61	(14,00)	(10,28)	2,26	2,23
Jambi	2,38	2,28	7,25	(3,73)	1,46	1,20
Sumatera Selatan	4,88	4,08	4,87	(25,94)	3,86	1,82
Bengkulu	4,80	4,67	5,08	34,88	5,65	3,41
Lampung	3,43	3,95	5,04	(20,01)	6,29	3,08
Kep. Bangka Belitung	4,40	4,61	8,19	(11,58)	1,90	3,15
Kepulauan Riau	7,35	5,17	7,26	(6,23)	5,79	3,46
<b>SUMATERA</b>	<b>5,07</b>	<b>4,03</b>	<b>7,44</b>	<b>(14,91)</b>	<b>3,43</b>	<b>2,39</b>

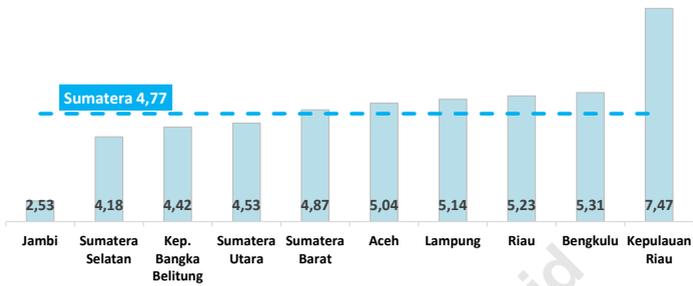
Nilai *ICOR* Pulau Sumatera pada triwulan III tahun 2017-2022 hampir setiap triwulan III nya selalu bertanda positif, kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Pada triwulan III tahun 2019, Provinsi Riau saja yang mengalami penurunan nilai PDRB ADHB jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (2018) sehingga diperoleh nilai koefisien *ICOR* bertanda negatif. Sementara itu, pada triwulan III tahun 2020, hampir semua provinsi mengalami penurunan nilai PDRB ADHB, kecuali Provinsi Aceh dan Bengkulu, sehingga koefisien *ICOR* bertanda positif hanya didapatkan pada kedua provinsi tersebut. Hal ini seperti diketahui bahwa kondisi pandemi Covid-19 sedang mengalami puncaknya pada tahun 2020, sedangkan dampak pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh kepada Provinsi Aceh dan Bengkulu dibandingkan daerah lainnya di Sumatera.

Namun demikian, dengan mengabaikan tanda positif maupun negatif, nilai *ICOR* Pulau Sumatera selama periode triwulan III tahun 2017-2022 paling kecil didapatkan pada triwulan III tahun 2022 yaitu sekitar 2,39. Hal ini menggambarkan bahwa keadaan investasi semakin membaik dibandingkan pada triwulan III tahun sebelumnya. Jika dilihat secara detail, semua provinsi di Sumatera memperoleh nilai koefisien *ICOR* yang lebih kecil

dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai *ICOR* yang paling besar, yaitu 3,46 sedangkan Provinsi Jambi memperoleh nilai *ICOR* paling kecil yaitu sebesar 1,20.

Nilai *ICOR* triwulan III pada tahun berjalan (metode standar) untuk Regional Sumatera dapat diperhatikan bahwa bernilai fluktuatif dan terdapat beberapa nilai *ICOR* yang ekstrim pada tahun-tahun tertentu, terutama pada triwulan III tahun 2020. Oleh sebab itu, maka perlu diperhatikan juga nilai *ICOR* secara periodik (metode akumulasi) untuk menghindari terdapatnya nilai *ICOR* yang ekstrim. Gambar 14 menunjukkan bahwa nilai *ICOR* akumulasi Pulau Sumatera beserta dengan masing-masing provinsi periode triwulan III tahun 2017-2022. *ICOR* Regional Sumatera bernilai sebesar 4,77 yang didapatkan dari perbandingan total PMTB dan perubahan total PDRB ADHB provinsi yang ada di wilayah Regional Sumatera. Nilai ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata, Regional Sumatera membutuhkan 4,77 unit PMTB untuk mampu menaikkan PDRB sebesar 1 unit selama periode triwulan III tahun 2017-2022.

Jika dirinci lebih lanjut, adapun provinsi yang memiliki nilai *ICOR* paling tinggi di Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai *ICOR* mencapai 7,47 yang berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit dibutuhkan sebesar 7,47 unit PMTB. Sementara itu nilai *ICOR* paling kecil diperoleh Provinsi Jambi dengan nilai 2,53, yang berarti bahwa untuk menaikkan PDRB sebesar 1 unit dibutuhkan 2,50 unit PMTB. Adapun Provinsi lainnya, seperti Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara memperoleh nilai *ICOR* dibawah total *ICOR* Sumatera masing-masing sebesar 4,18, 4,42, dan 4,53. Sedangkan Provinsi lainnya memperoleh nilai *ICOR* di atas total *ICOR* Sumatera. Namun demikian, secara umum pada triwulan III tahun 2017-2022, belum ada daerah/provinsi di Sumatera yang bisa dikatakan sudah menunjukkan terjadinya produktivitas investasi yang baik, karena nilai *ICOR* tidak berada pada interval 3-4.



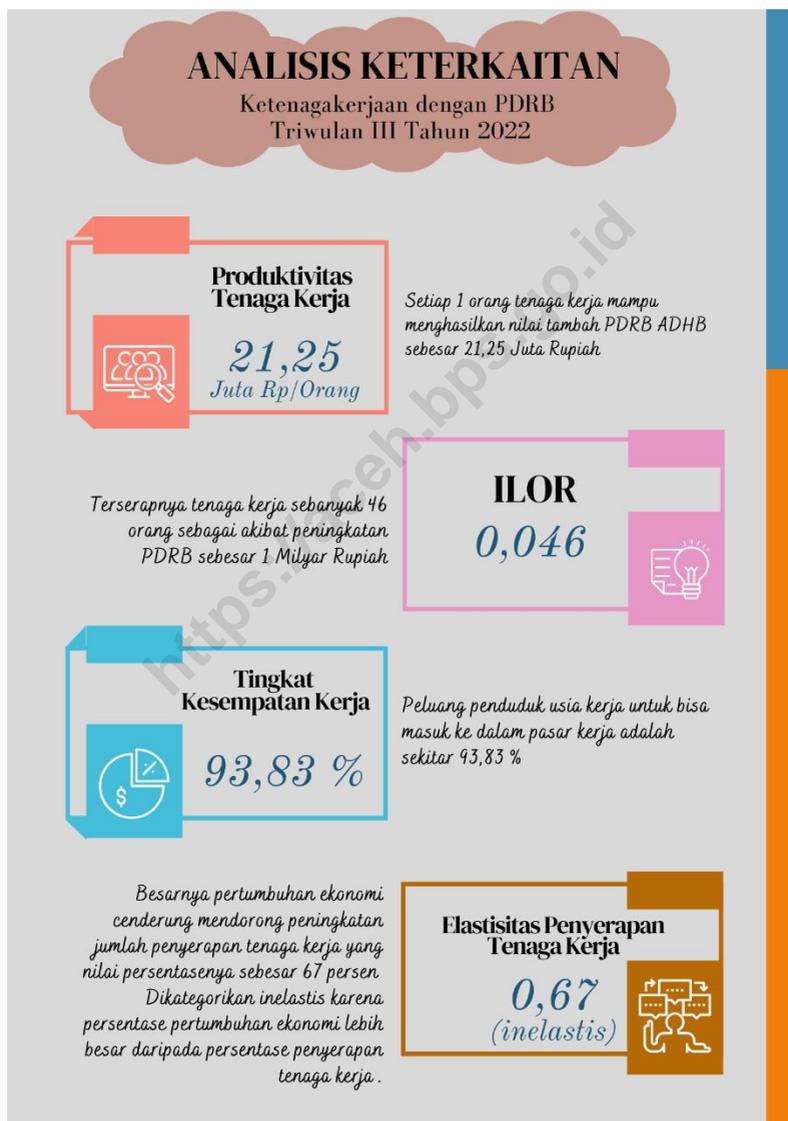
**Gambar 14. ICOR Provinsi di Wilayah Sumatera Metode Akumulasi Triwulan III Tahun 2017-2022 (y-on-y)**

<https://aceh.bpjs.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

## Infografis 5.



<https://aceh.bps.go.id>

***ANALISIS KETERKAITAN  
PDRB DENGAN  
KETENAGAKERJAAN***

<https://id.scribd.com/doc/111111111>



## V. ANALISIS KETERKAITAN PDRB DENGAN KETENAGAKERJAAN

### 5.1 Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal/Incremental Labour Output Ratio (ILOR)

Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) di Provinsi Aceh selama triwulan III periode tahun 2017-2022 dapat dilihat bahwa mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 16,28 juta rupiah per orang sampai tahun 2022 menjadi 21,25 juta rupiah per orang artinya terjadi peningkatan sebesar 4,97 juta rupiah per orang. Pada triwulan III tahun 2022 kenaikan terlihat sangat signifikan yaitu sekitar 2,37 juta rupiah per orang dibandingkan pada triwulan III tahun 2021. Kenaikan ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik setelah puncak pandemi covid-19 pada tahun 2020. Pada triwulan III tahun 2020, keadaan ekonomi masyarakat sedang mengalami penurunan, perusahaan mengurangi kegiatan proses produksi sehingga produktifitas tenaga kerja juga mengalami penurunan yaitu turun sekitar 920 ribu rupiah per orang dibandingkan tahun 2019.



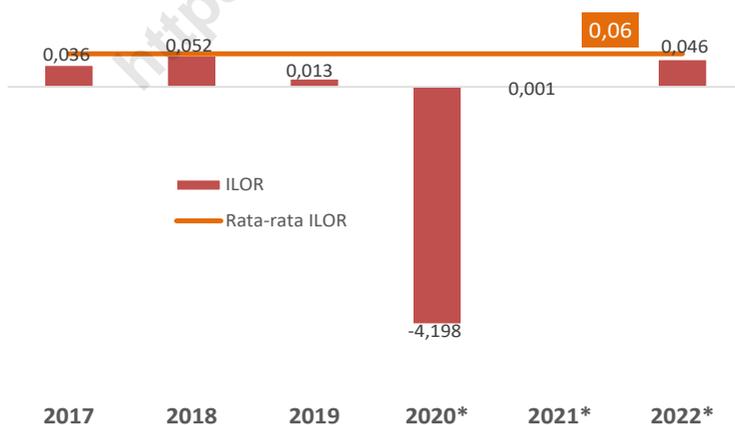
\* Estimasi data sakernas diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015

**Gambar 15. Produktifitas Tenaga Kerja Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022 (Juta Rp/Orang)**

Seiring dengan kasus pandemi covid-19 yang semakin melandai dan gencarnya usaha pemerintah dalam melaksanakan program vaksinasi sehingga kegiatan ekonomi masyarakat semakin pulih. Produktifitas tenaga kerja juga semakin meningkat signifikan sejak tahun 2021 yaitu naik sekitar 2,2 juta rupiah per orang. Kenaikan ini menghasilkan produktifitas sekitar 18,88 juta rupiah per orang pada triwulan III tahun 2021, bahkan

mencapai lebih dari produktifitas pada periode sebelumnya. Kenaikan juga terus terjadi sampai triwulan III tahun 2022, dapat dilihat pada Gambar 15. Produktivitas tenaga kerja yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa tenaga kerja mampu meningkatkan kinerja dalam menghasilkan nilai tambah PDRB di Provinsi Aceh.

Besaran penambahan tenaga kerja dan penambahan PDRB jika dihitung setiap satu kurun waktu akan menghasilkan angka yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat berdasarkan Gambar 14. Selama periode triwulan III tahun 2017-2022, nilai *ILOR* menunjukkan gerakan yang fluktuatif, pada triwulan III tahun 2017 sebesar 0,036 kemudian naik menjadi 0,052 pada triwulan III tahun 2018 kemudian turun lagi menjadi 0,013 pada triwulan III tahun 2019 dan pada triwulan III tahun 2020 menjadi 4,20 tetapi dengan arah negatif. Nilai negatif diperoleh karena adanya penurunan PDRB ADHK pada triwulan III tahun 2020 dibandingkan triwulan III tahun 2019 tetapi masih terjadinya penyerapan tenaga kerja. Nilai *ILOR* pada triwulan III tahun 2022 yaitu sebesar 0,046, hal ini dapat diartikan bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 46 orang sebagai akibat adanya kenaikan PDRB ADHK sebesar 1 Milyar rupiah.



\* Estimasi data sakernas diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015

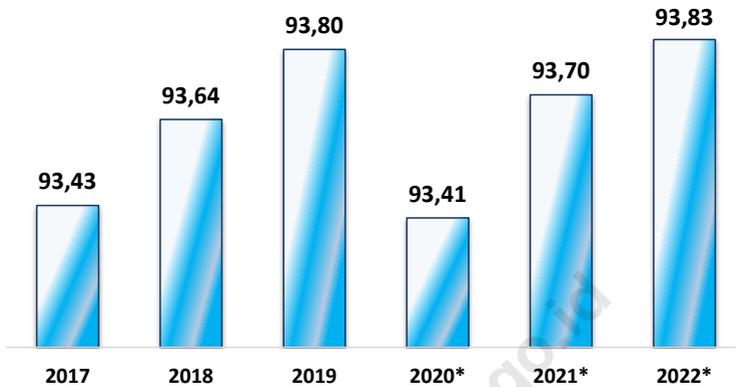
**Gambar 16. *ILOR* Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022**

Sehubungan dengan nilai *ILOR* yang mengalami angka fluktuatif, maka penghitungan *ILOR* dapat dilakukan dengan membuat rata-rata *ILOR* per tahun dalam kurun waktu 6 tahun. Hasil yang diperoleh adalah nilai *ILOR* pada triwulan III tahun 2017-2022 bernilai positif yaitu 0,06. Hal ini dapat diartikan bahwa, pada triwulan III tahun 2017-2022 rata-rata tenaga kerja yang terserap dalam kegiatan ekonomi sebanyak 6 orang sebagai akibat adanya kenaikan output sebesar 100 juta rupiah. (Gambar 16).

## 5.2 Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja penduduk Provinsi Aceh pada triwulan III periode tahun 2017-2022 juga terlihat fluktuatif. Tingkat kesempatan kerja paling rendah terjadi pada triwulan III tahun 2020 yaitu sebesar 93,41 persen dan paling tinggi pada triwulan III tahun 2022 sebesar 93,83 persen. Penurunan kesempatan kerja pada triwulan III tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 yang banyak menyebabkan perusahaan/pelaku usaha menutup tempat usaha atau mengurangi kegiatan produksi sehingga tidak membutuhkan banyak tenaga kerja dilihat dari meningkatnya data pengangguran pada triwulan III tahun 2020. Namun demikian disisi lain, pada waktu yang sama (triwulan III tahun 2020) adanya peningkatan jumlah masyarakat yang bekerja, kemungkinan hal ini disebabkan karena masyarakat mengalihkan pekerjaan kepada kategori lapangan usaha yang berbeda.

Pada triwulan III tahun 2021 sampai triwulan III tahun 2022, persentase kesempatan kerja kembali meningkat, seiring dengan semakin pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat. Dari angka yang diperoleh, dapat diketahui bahwa peluang seorang penduduk usia kerja di Provinsi Aceh yang termasuk ke dalam angkatan kerja untuk bisa bekerja pada triwulan III tahun 2022 adalah sekitar 93,83 persen (Gambar 17).



\* Estimasi data sakernas diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015

**Gambar 17. Tingkat Kesempatan Kerja di Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022 (Persen)**

Adapun nilai elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh triwulan III tahun 2017 sampai 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Perkembangan Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Aceh Triwulan III Tahun 2017-2022**

Triwulan III Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Tenaga Kerja (%)	Elastisitas	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2017	4,79	2,47	0,52	inelastis
2018	4,06	3,05	0,75	inelastis
2019	3,70	0,73	0,20	inelastis
2020*	-0,10	6,32	-63,22	elastis
2021*	3,02	0,06	0,02	inelastis
2022*	2,13	1,43	0,67	inelastis

\*Estimasi data sakernas diolah dengan menggunakan penimbang hasil proyeksi SUPAS2015

Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 2 di atas, didapati selama periode triwulan III tahun 2017-2022 elastisitas tenaga kerja kondisi triwulan III lebih dominan kepada kategori inelastis, pertumbuhan ekonomi masih mampu meningkatkan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja namun persentase pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja. Terdapat 1 (satu) kurun waktu yang masuk ke dalam kategori elastis tetapi bertanda negatif, persentase perubahan nilai PDRB tahun sebelumnya lebih kecil daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi pada triwulan III tahun 2020, penurunan pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 tidak menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja, peluang kerja masih terbuka walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi triwulan III tahun 2022 masuk kategori inelastis, berarti bahwa persentase perubahan nilai PDRB lebih besar daripada persentase perubahan jumlah tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada triwulan III tahun 2022 tercatat sebesar 2,39 juta orang dengan persentase perubahan jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar 1,43 persen dibandingkan triwulan III tahun 2021. Sementara itu, nilai PDRB pada triwulan III tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 2,13 persen dibandingkan pada triwulan III tahun 2021. Kondisi pertumbuhan ekonomi sudah lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya sehingga mendorong terjadi peningkatan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja.

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://aceh.bps.go.id>

# **LAMPJRN**

<https://aceh.lampjrn.go.id>



Lampiran 1. **PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022 (Triliun Rupiah)**

Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku						
	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25,34	26,52	26,94	27,59	27,36	28,74	28,88
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,86	0,86	0,90	0,91	0,94	0,95	0,99
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,36	10,99	9,77	12,57	5,34	9,00	9,07
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,81	15,76	16,46	17,22	16,25	16,40	16,76
5 Perubahan Inventori	0,01	0,23	0,00	-0,07	0,12	0,06	-0,04
6 Ekspor Luar Negeri	1,83	1,62	1,51	2,64	2,43	2,78	2,88
7 Dikurangi Impor Luar Negeri	0,13	0,35	0,18	0,24	0,29	0,73	0,30
8 Net Ekspor Antar Daerah	-7,37	-10,25	-7,82	-10,33	-4,19	-5,41	-4,80
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>41,70</b>	<b>45,39</b>	<b>47,58</b>	<b>50,30</b>	<b>47,95</b>	<b>51,79</b>	<b>53,44</b>

Lampiran 2. **PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022 (Triliun Rupiah)**

Komponen	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17,70	18,55	18,83	19,04	18,84	19,34	19,21
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,60	0,60	0,63	0,63	0,64	0,64	0,66
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,28	6,49	5,87	7,57	3,21	5,30	5,32
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	11,09	10,97	11,36	11,89	11,01	11,04	11,11
5 Perubahan Inventori	0,00	0,12	0,00	-0,03	0,06	0,03	-0,02
6 Ekspor Luar Negeri	1,46	1,12	1,00	1,76	1,49	1,55	1,61
7 Dikurangi Impor Luar Negeri	0,07	0,19	0,12	0,16	0,18	0,35	0,19
8 Net Ekspor Antar Daerah	-1,99	-4,57	-3,18	-5,03	-1,94	-3,00	-2,56
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>32,09</b>	<b>33,10</b>	<b>34,40</b>	<b>35,66</b>	<b>33,13</b>	<b>34,54</b>	<b>35,14</b>

Lampiran 3. **Laju Pertumbuhan c-to-c PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022 (Persen)**

Komponen	Laju Pertumbuhan C to C						
	2021				2022		
	Triw I	Triw I-II	Triw I-III	Triw I-IV	Triw I	Triw I-II	Triw I-III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-5,20	-2,49	-0,66	1,16	6,44	5,33	4,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-6,86	-6,97	-6,25	-3,98	6,14	6,24	5,90
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,25	6,39	4,10	8,12	-2,12	-12,94	-11,65
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,59	1,72	0,62	0,38	-0,73	-0,09	-0,82
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	10,40	23,83	27,02	48,19	1,68	17,73	29,68
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-73,73	-22,46	-4,89	-10,06	151,93	101,35	88,42
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-1,89</b>	<b>0,32</b>	<b>1,24</b>	<b>2,79</b>	<b>3,24</b>	<b>3,81</b>	<b>3,23</b>

## Lampiran 4.

**Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022 (Persen)**

Komponen	Laju Pertumbuhan <i>Y on Y</i>						
	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-5,20	0,25	3,04	6,85	6,44	4,27	2,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-6,86	-7,08	-4,85	3,29	6,14	6,35	5,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,25	9,18	0,49	17,51	-2,12	-18,41	-9,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,59	1,85	-1,45	-0,29	-0,73	0,56	-2,24
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	10,40	47,32	36,01	124,62	1,68	38,76	60,41
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-73,73	179,61	94,74	-20,58	151,93	82,62	59,22
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-1,89</b>	<b>2,56</b>	<b>3,02</b>	<b>7,39</b>	<b>3,24</b>	<b>4,36</b>	<b>2,13</b>

## Lampiran 5.

**Laju Pertumbuhan *q-to-q* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022 (Persen)**

Komponen	Laju Pertumbuhan Q to Q						
	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,70	4,78	1,55	1,12	-1,07	2,64	-0,65
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-1,30	-0,02	4,41	0,25	1,42	0,17	3,34
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-49,02	97,90	-9,56	28,80	-57,54	64,96	0,32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,93	-1,08	3,53	4,61	-7,34	0,21	0,65
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	87,27	-23,73	-10,04	74,82	-15,23	4,08	3,99
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-63,72	170,05	-39,30	33,54	15,09	95,75	-47,08
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-3,37</b>	<b>3,15</b>	<b>3,94</b>	<b>3,66</b>	<b>-7,10</b>	<b>4,27</b>	<b>1,72</b>

Lampiran 6. **Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100) Triwulanan-2021 sampai Triwulan-III 2022**

Komponen	Indeks Implisit						
	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	143,15	143,02	143,03	144,88	145,21	148,61	150,34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	143,31	143,25	143,50	145,18	146,74	148,56	150,29
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	163,35	169,18	166,29	166,17	166,23	169,76	170,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	142,49	143,58	144,89	144,91	147,55	148,64	150,88
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	124,91	145,53	150,58	150,31	163,50	179,36	178,84
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	180,05	179,98	149,94	154,85	160,47	206,40	161,56
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>129,97</b>	<b>137,15</b>	<b>138,29</b>	<b>141,06</b>	<b>144,75</b>	<b>149,92</b>	<b>152,09</b>

Lampiran 7. **Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022 (Persen)**

Komponen	Laju Indeks Implisit						
	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,04	-0,09	0,00	1,29	0,23	2,34	1,16
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,20	-0,04	0,17	1,17	1,08	1,24	1,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,59	3,57	-1,71	-0,07	0,04	2,12	0,51
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,96	0,77	0,91	0,02	1,82	0,74	1,51
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-14,17	16,51	3,46	-0,18	8,77	9,70	-0,29
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	31,98	-0,04	-16,69	3,28	3,63	28,62	-21,72
8. Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>0,98</b>	<b>5,52</b>	<b>0,83</b>	<b>2,00</b>	<b>2,62</b>	<b>3,57</b>	<b>1,45</b>

Lampiran 8. **Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022**

Komponen	Distribusi						
	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60,76	58,43	56,62	54,85	57,05	55,49	54,05
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,07	1,90	1,90	1,82	1,96	1,84	1,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,85	24,21	20,53	24,99	11,14	17,37	16,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	37,91	34,71	34,60	34,24	33,89	31,68	31,36
5. Perubahan Inventori	0,01	0,52	-0,01	-0,14	0,24	0,12	-0,08
6. Ekspor Luar Negeri	4,38	3,58	3,18	5,24	5,07	5,36	5,39
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,31	0,76	0,37	0,48	0,60	1,40	0,56
8. Net Ekspor Antar Daerah	-17,67	-22,58	-16,45	-20,53	-8,74	-10,45	-8,99
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>100,00</b>						

Lampiran 9. **Sumber Pertumbuhan y-on-y PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan-2021 sampai Triwulan III-2022 (Persen)**

Komponen	Sumber Pertumbuhan Y-on-Y						
	2021				2022		
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II	Triw III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-2,97	0,14	1,67	3,68	3,55	2,39	1,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-0,14	-0,14	-0,10	0,06	0,12	0,12	0,10
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,12	1,69	0,09	3,40	-0,22	-3,61	-1,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,53	0,62	-0,50	-0,10	-0,25	0,19	-0,74
5. Perubahan Inventori	0,34	1,28	-0,15	-0,93	0,16	-0,28	-0,06
6. Ekspor Luar Negeri	0,42	1,11	0,80	2,93	0,08	1,31	1,76
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,61	0,38	0,17	-0,12	0,34	0,48	0,20
8. Net Ekspor Antar Daerah	-0,82	-1,76	1,39	-1,76	0,14	4,74	1,79
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-1,89</b>	<b>2,56</b>	<b>3,02</b>	<b>7,39</b>	<b>3,24</b>	<b>4,36</b>	<b>2,13</b>

Lampiran 10. **Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan III-2022**

Provinsi Regional Sumatera	PDRB ADHB Triwulan III-2022 (Triliun Rupiah)	Kontribusi Terhadap Pulau Sumatera		Laju Pertumbuhan Triwulan III-2022 (Persen)		
		Triwulan III-2022 (Persen)	Laju Pertumbuhan Triwulan III-2022 (Persen)			
			q-to-q	y-on-y	c-to-c	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Aceh	53,44	4,98	1,72	2,13	3,23	
Sumatera Utara	243,91	22,73	2,24	4,97	4,54	
Sumatera Barat	72,65	6,77	1,64	4,54	4,42	
Riau	249,65	23,26	4,34	4,63	4,75	
Jambi	71,60	6,67	2,52	5,20	5,15	
Sumatera Selatan	149,98	13,97	2,55	5,34	5,24	
Bengkulu	22,53	2,10	-2,33	4,37	4,11	
Lampung	108,28	10,09	0,84	3,91	4,02	
Kep. Bangka Belitung	23,74	2,21	1,11	4,51	4,36	
Kepulauan Riau	77,42	7,21	0,58	6,03	4,63	
<b>SUMATERA</b>	<b>1.073,19</b>	<b>100,00</b>	<b>2,27</b>	<b>4,71</b>	<b>4,58</b>	

## ***DAFTAR PUSTAKA***

<https://aceh.bps.go.id>



- Anton Trianto, Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Selatan, 2017. Akuisisi-vol 13 No. 1 April 2017, Palembang.
- BPS Aceh. 2022. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh 2017-2022. Banda Aceh.
- . 2022. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan II-2022. Banda Aceh.
- Case, dan Fair. 2005. Prinsip-prinsip Ekonomi Mikro, Edisi IX, (Alih Bahasa Barlian Muhamad). PT INDEKS. Jakarta.
- Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik. Penyusunan Indikator Ekonomi *Incremental Capital Output Ratio* 2011. 2012. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012, hlm.83-95. Yogyakarta.
- Dornbusch, Rudiger & Fischer. 2004. Macroeconomics (9th ed). Mc Graw – Hill Companies. New York.
- European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. 2009.SNA 2008. New York.
- Mahalli, Kasyful. 2008. Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan. WAHANA HIJAU Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah, Vol.3, No.3,April 2008. Medan.
- Mankiw, N, Gregory. 2001. Teori Ekonomi Makro. Edisi 7. Tahun 2000. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses. Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tambunan. 2001. Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Tison Arif. 2011. Pengaruh efisiensi perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi 32 provinsi di indonesia. Jurnal skripsi.

Siwu, dkk. 2021. Analisis Incremental Capital Output Ratio Sektor Unggulan di Kota Tomohon. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.21, No. 05 Oktober 2021. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas EKonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

<https://www.aceh.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

<https://aceh.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



***BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH***

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

Homepage : <http://aceh.bps.go.id>

Email : [bps1100@mailhost.bps.go.id](mailto:bps1100@mailhost.bps.go.id)